

PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, TRANSPARANSI PUBLIK, DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH

Nur Rodiya
Nrodiya7@gmail.com
Akhmad Riduwan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The research aimed to examine the effect of public accountability, public transparency and budget target clarity on regional work unit performance. While the research was quantitative. Meanwhile, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. Moreover, the population was Surabaya regional work unit performance. Furthermore, the instrument was survey. Besides, the data were primary which in form of questionnaires. The data questionnaires were distributed directly to respondents. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression. The results of this study state public accountability has a positive and significant effect on the performance of local government officials. That is because one of the main elements of the embodiment of good corporate governance. Shows that the stronger and higher the accountability of the government, the better it will affect the performance results of local government officials. The results of this study stated that public transparency has a positive and significant effect on the performance of local government officials. The results of this study stated that the clarity of budget targets had a positive and significant effect on the performance of local government officials.

Keyword: public accountability, public transparency, and budgetary target clarity

ABSTRAK

Peneliti ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Jenis peneliti ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (SKPD) di Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Data yang digunakan penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan salah satu unsur pokok perwujudan *good corporate governance*. menunjukkan bahwa semakin kuat dan tinggi akuntabilitas pemerintah maka akan semakin berpengaruh baik terhadap hasil kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menyatakan Transparansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. menunjukkan bahwa semakin kuat dan tinggi Transparansi pemerintah maka akan semakin berpengaruh baik terhadap hasil kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Kata kunci: akuntabilitas publik, transparansi publik, dan kejelasan sasaran anggaran

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai suatu alat pertanggungjawaban kepada publik. Lembaga publik mendapat tuntutan yang berasal dari masyarakat agar dapat dikelola secara akuntabel, transparan dan bertanggungjawab dalam menjalankan administrasi pemerintah yang

khususnya berhubungan dengan anggaran. Pemerintah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah agar senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan kualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan tersebut. Semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan tentang pertanggungjawaban yang telah dipercayakan, oleh karena itu masyarakat mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, yang meliputi perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi dan perwakilan. Kinerja manajerial organisasi merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Kinerja pemerintah dapat dipahami sebagai tingkat pencapaian sejauhmana proses kegiatan organisasi itu memberikan hasil atau mencapai tujuan. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang mulai dari proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Tuntutan akuntabilitas bagian dari terciptanya *good governance* terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan semakin luas sistem pemerintahan yang berbasis otonomi daerah di Indonesia. Menurut Sopanah dan Wahyudi (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan seriap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Pertanggungjawaban publik, masyarakat bisa menilai derajat pencapaian dan kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Menurut Mardiasmo (2002:103) menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak juga untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut. Salah satu penting dari karakteristik tujuan anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Menurut Kenis (1979) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran yang ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian anggaran tersebut. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran akan meningkatkan tanggung jawab individu untuk menyusun target-target anggarannya. Sehingga diharapkan organisasi lebih membuka ruang dan perencanaan yang baik dalam menyusun anggarannya.

Penyebab tidak efektif dan efisien dikarenakan ketidakjelasan sasaran anggaran yang mengakibatkan aparat pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penyusunan target anggaran. Kejelasan sasaran anggaran yang jelas bisa memudahkan SKPD untuk menyusun target anggaran. Target-target anggaran disusun sesuai dengan sasaran yang dicapai pemerintah daerah. Karena kinerja sendiri merupakan hasil akhir (*output*) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Sebagai organisasi besar, SKPD dianggap sebagai pusat pertanggungjawaban. SKPD merupakan organisasi pemerintah yang dekat dengan masyarakat, dan memiliki kemampuan dalam pelaksanaan aktivitas pemerintahan. Adanya RKA-SKPD sudah mencakup anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Hal ini dimaksud anggaran berbasis kinerja menuntut adanya pengeluaran yang dialokasikan setiap pengeluaran yang berorientasi ekonomi, efisien, dan efektif. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran disebut dengan RKA-SKPD yaitu suatu kewajiban yang dilaksanakan oleh kepala bagian kerja SKPD yang mengevaluasi hasil pelaksanaan program, dan 2 tahun anggaran sebelumnya sampai semester pertama tahun anggaran berjalan. Tujuan evaluasinya untuk menilai program dan kegiatan yang belum dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya yang akan dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1

tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Proses penyusunan anggaran haruslah mengedepankan rasionalitas kebutuhan belanja publik maupun belanja aparatur, agar terhindar dari *over budgeting*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah? (2) Apakah transparansi publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah? (3) Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah? Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. (2) Untuk mengetahui pengaruh transparansi publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. (3) Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

TINJAUAN TEORITIS

Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Transparansi Publik

Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Corporate Governance*. Menurut Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa transparansi dibangun atas arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Kejelasan Sasaran Anggaran

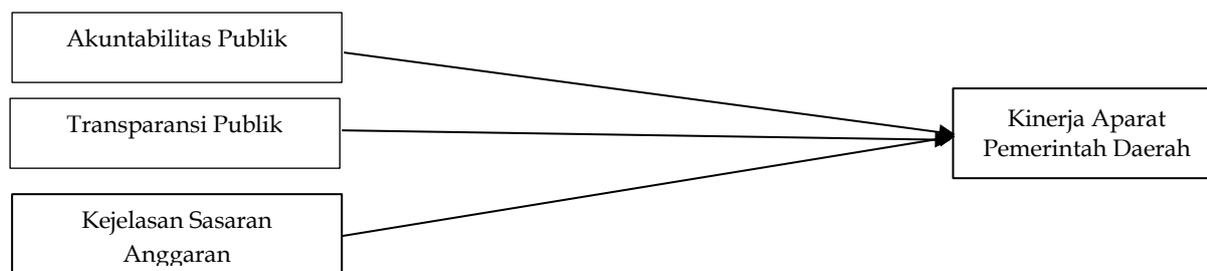
Menurut Putra (2013) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Syafriah (2009) mengatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku karyawan.

Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Kinerja (*Performance*) yang berarti sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu ataupun kelompok individu. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Rerangka Konseptual

Hasil Rerangka Konseptual pada penelitian yang berjudul pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka konseptual
Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Dalam pengertian akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan dalam arti sempit yaitu sebagai bentuk pertanggung jawaban yang mengacu kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggungjawab. Menurut Setiawan (2012) menyebutkan bahwa dengan adanya akuntabilitas pemerintah daerah, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja pemerintah daerah, sehingga jalannya pemerintahan dapat berlangsung dengan sebaik mungkin. Pentingnya hal ini menegaskan akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial, karena adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat. Karena itu, semakin akuntabel suatu pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah akan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh akuntabilitas publik dan kinerja aparat pemerintah daerah. Dugaan ini akan diuji dalam hipotesis yaitu:

H₁: Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah

Pengaruh Transparansi Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Transparansi dibangun diatas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses, pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Mempunyai tiga aspek transparansi yang dapat dilihat yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif. Hal yang disebabkan Transparansi karena baiknya komunikasi yang dilakukan pemerintah dengan publik seperti anggaran selalu dikomunikasikan melalui media massa secara terbuka dan hak masyarakat terhadap akses informasi seperti informasi yang cukup diberikan kepada publik tentang prosedur dan tanggung jawab organisasi pemerintah. Dan dapat menimbulkan kinerja anggaran yang sesuai tujuan organisasi pemerintah tersebut. Oleh hal itu setiap penyelenggaraan pemerintah harus terbuka masyarakat umum. Agar pengumuman anggaran bisa mudah didapat setiap waktu dan mudah didapatkan oleh publik. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Transparansi Publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Kenis, 1979 (dalam Bangun, 2009) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran adalah sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab. Anggaran daerah harus menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dan harus mengetahui sasaran anggaran yang jelas tingkat kinerja yang dicapai. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan aparat untuk menyusun target-target anggaran yang jelas diharapkan aparat pemerintah daerah dalam hal ini masing-masing SKPD mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang dilakukan melalui studi dengan menggunakan metode Kausal Komparatif (*Causal-Comparative Research*). Penelitian Kausal Komparatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sebab-akibat pengaruh antara dua variabel atau lebih. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang didasarkan atas perhitungan presentase, rata-rata (*Mean*), *Chi Kuadrat*, dan perhitungan statistik lainnya (Soewadji, 2012). Dengan kata lain, penelitian ini melibatkan perhitungan atau angka atau kuantitas. Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, dan kejelasan sasaran anggaran sebagai variabel independen terhadap kinerja aparat pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Jumlah populasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Surabaya sebanyak 30 SKPD, yang terdiri dari 21 dinas, 5 Badan, 2 RSUD, dan 1 Satuan polisi Pamong Praja, 1 Inspektorat. Dan peneliti ini mengambil populasi pada SKPD Kota Surabaya sebanyak 22 SKPD, yang terdiri dari 18 Dinas, 3 Badan, dan 1 Satuan Polisi Pamong Praja.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel digunakan dalam penelitian ini adalah teknik “*purposive sampling*” yang berarti bahwa informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan. Berikut kriteria yang digunakan dalam pemngambilan sampel ini adalah: (1) Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas/Badan , Kepala Bagian Keuangan, sekretaris pada SKPD Kota Surabaya sebanyak 3 orang yang menjadi responden. (2) Masa jabatan minimal 3 tahun atau lebih di SKPD. (3) Pendidikan terakhir minimal D3. Pengambilan sampel dalam data yang dibutuhkan oleh peneliti ini didapat dengan cara menyebarkan kuesioner pada 22 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surabaya, yang terdiri dari 18 Dinas, 3 Badan, dan 1 Satuan Polisi Pamong Praja. Jumlah kuesioner yang disebarkan untuk setiap SKPD sebanyak 3 kuesioner, sehingga total kuesioner yang disebarkan sebanyak 66 kuesioner. Penentuan kriteria sampel didasari alasan populasi tersebut merupakan pihak yang terlibat sebagai responden yang dianggap mampu untuk menggambarkan keseluruhan kinerja aparat pemerintah daerah.

Tabel 1
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya

NO	INSTANSI
1	Satuan Polisi Pamong Praja

2	Badan Perencanaan dan Pembangunan
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
4	Badan Kepegawaian dan Diklat
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang
6	Dinas Pendidikan
7	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
8	Dinas Kesehatan
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Dinas Tenaga Kerja
12	Dinas Sosial
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
14	Dinas Perdagangan
15	Dinas Pengelolaan Bangunan Tanah
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
18	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
19	Dinas Lingkungan Hidup
20	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematasan
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
22	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber: www.surabaya.go.id

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data subjek (*Self-Report Data*). Data subjek merupakan jenis data penelitian yang berupa opini, sikap pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber yang asli (tidak melalui media perantara). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil jawaban pengisian kuesioner oleh responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah dengan cara metode survey. Data untuk penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada masing-masing SKPD. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada Responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014:199). Kuesioner diberikan secara langsung kepada responden demikian pula pengembaliannya dijemput sendiri oleh peneliti sesuai waktu yang telah ditentukan.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Transparansi Publik

Transparansi publik adalah adanya keterbukaan mengenai anggaran yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Pengukuran variabel ini menggunakan *skala likert*.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran yang ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran itu mudah dipahami oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran tersebut.

Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Kinerja aparat pemerintah daerah adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial yang efektif dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses menyederhanakan sebuah data tersebut kedalam bentuk yang mudah dibaca untuk dipahami dan diinterpretasikan. Karena analisis data ini berfungsi untuk menentukan kesimpulan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis datanya menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) tujuannya untuk menentukan pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Ada tahap-tahap untuk mengelola data setelah data terkumpul yaitu sebagai berikut:

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari alat atau prosedur yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang generalisasi. Pengujian ini digunakan untuk mendeskripsikan karakter responden mengenai pertanyaan kuisisioner yang berkaitan tentang variabel-variabel yang diteliti yaitu: variabel akuntabilitas publik, transparansi publik, kejelasan sasaran anggaran dan kinerja aparat pemerintah daerah yang nantinya akan disajikan dalam bentuk tabel deskriptif dalam SPSS.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas adalah ukuran untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Bila hasil instrumen atau pertanyaan yang valid maka mempunyai validitas yang tinggi. Dasar analisis yang digunakan untuk pengukuran uji validitas, yaitu; (1) Jika r hitung $>$ r tabel, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. (2) Jika r hitung $<$ r tabel, maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur jawaban dari kuesioner yang tetap memiliki kesamaan atau konsisten apabila dilakukan dua kali atau lebih dengan menggunakan alat ukur hasil uji reliabilitas yang dilakukan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha. Pada masing-masing variabel jika nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian tersebut dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data yang dilakukan peneliti tujuannya untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Dan pengujian ini mendapatkan kesimpulan variabel berdistribusi normal, maka model regresi yang digunakan peneliti dapat dikatakan baik atau normal. Selain itu untuk menguji normalitas pada model regresi diuji dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov Test*. Dasar pengambilan keputusan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov Smirnov Test* adalah: (1) Apabila hasil nilai probabilitas $>$ 0,05 maka menunjukkan pola distribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas. (2) Apabila hasil nilai probabilitas $<$ 0,05 maka tidak menunjukkan pola distribusi normal atau tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas yang dilakukan peneliti tujuannya untuk menguji apakah ada tidaknya korelasi antara variabel independen dalam sebuah model regresi. Untuk memenuhi kriteria *BLUE* maka sebaiknya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Bila sudah diuji dan ditemukan terjadi korelasi maka terdapat *problem mutikolonieritas*. Untuk menguji adanya multikolinieritas atau tidak adalah dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance*. Jika $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,1$ maka tidak terjadi multikolinieritas dan sebaliknya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yang dilakukan peneliti tujuannya untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Serta menguji terjadi atau tidaknya ketidaksamaan deviasi standar nilai pada variabel dependen disetiap variabel independennya dalam suatu model regresi. Cara untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas yaitu: (a) Apabila ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada dalam grafik membentuk pola yang teratur (gelombang, melebar kemudian menyempit), maka dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas. (b) Apabila tidak ada pola yang jelas, beserta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Alat analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas Publik (AP), Transparansi Publik (TP), dan Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA), sedangkan dalam penelitian ini variabel terikat atau variabel dependennya adalah kinerja aparat pemerintah daerah (KAP). Analisis regresi linier berganda merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis dengan analisis regresi linier berganda diformulasikan sebagai berikut:

$$KAP = \alpha + \beta_1AP + \beta_2TP + \beta_3KSA + e$$

Uji Kelayakan Model

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variasi variabel independen dapat menjelaskan secara keseluruhan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) ini untuk menunjukkan besarnya variabel independent yang mempengaruhi variabel dependen tersebut. Nilai R^2 mendekati nol maka semakin lemahnya hubungan anatar keduanya. Semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel terikat maka R^2 diperoleh mendekati satu.

Uji Statistik F

Uji F ini digunakan untuk melihat bagaimanakah pengaruh apakah variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Selain itu, uji F dapat digunakan untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan. Uji F ini mempunyai kriteria pengujian yaitu sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka model yang menunjukkan dalam penelitian tidak layak dan tidak dapat digunakan untuk analisis berikutnya. (b) Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka model yang menunjukkan dalam penelitian layak dan dapat digunakan untuk analisis berikutnya.

Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

Uji statistik t ini digunakan untuk melihat bagaimanakah pengaruh yang dilakukan secara parsial antara variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis ini yang dilakukan untuk menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Maka tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau $(\alpha) = 0,05$ (5%). Dengan kriteria ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut: (a) Jika nilai signifikan $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berarti secara parsial variabel independen termasuk tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. (b) Jika nilai signifikan $t \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini statistik deskriptif variabel digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian antara lain dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum. Dalam penelitian ini bahwa kuesioner terdapat 32 pernyataan yang terbagi yaitu 9 pernyataan yang mewakili Akuntabilitas Publik, 8 pernyataan yang mewakili Transparansi publik, 7 pernyataan yang mewakili Kejelasan Sasaran Anggaran, dan 8 pernyataan yang mewakili kinerja aparat pemerintah daerah. Kemudian hasil pernyataan tersebut diukur menggunakan *skala likert* untuk masing-masing variabel dependen dan independen. Dan hasil jawaban responden tersebut diminta untuk menilai pandangan mereka mengenai akuntabilitas publik, transparansi publik, kejelasan sasaran anggaran, dan kinerja aparat pemerintah daerah dengan skor 1 sampai 5. Jawaban responden diberi skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Netral (N), 4 = Setuju (S), 5 = Sangat Setuju (SS). Statistik deskriptif variabel penelitian digambarkan seperti dalam tabel 2 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
AP	55	27	45	38,40	4,370
TP	55	21	39	27,82	3,272
KSA	55	21	35	29,13	3,238
KAP	55	16	40	30,02	5,101
Valid N (listwise)	55				

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Dalam penelitian ini pada Tabel 2 dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Variabel Akuntabilitas Publik (X1) memiliki nilai minimum sebesar 27, nilai maksimum sebesar 45, dan nilai rata-rata sebesar 38,40 tersebut menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas publik yang diambil sebagai sampel adalah sangat baik. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 4,370 tersebut menjauhi angka 0 sehingga dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam. (2) Variabel Transparansi Publik (X2) memiliki nilai minimum sebesar 21, nilai maksimum sebesar 39, dan nilai rata-rata sebesar 27,82 tersebut menunjukkan bahwa variabel transparansi publik yang diambil sebagai sampel yang sangat baik. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 3,272 tersebut menjauhi angka 0 sehingga dikatakan bahwa penyebaran data tersebut cukup beragam. (3) Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X3) memiliki nilai minimum sebesar 21, nilai maksimum sebesar 35, dan nilai rata-rata sebesar 29,13 tersebut menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran yang diambil sebagai sampel yang sangat baik. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 3,238 tersebut menjauhi angka 0 sehingga dikatakan bahwa penyebaran data tersebut cukup beragam. (4)

Variabel Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y) memiliki nilai minimum sebesar 16, nilai maksimum sebesar 40, dan nilai rata-rata sebesar 30,02 tersebut menunjukkan bahwa variabel kinerja aparat pemerintah daerah yang diambil sebagai sampel yang sangat baik. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 5,101 tersebut menjauhi angka 0 sehingga dikatakan bahwa penyebaran data tersebut cukup beragam.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji Validitas ini digunakan untuk mengukur valid atau sah tidaknya suatu kuesioner. Pengujian kualitas data dilakukan dengan sampel uji coba sejumlah 55 orang. Angka kritik yang diperoleh dari penelitian ini yaitu $N - 2 = 55 - 2 = 53$ dengan tarif signifikan $\alpha = 5\%$, maka dalam penelitian ini angka kritik untuk r tabel adalah 0,2241. Pada penelitian ini menunjukkan hasil uji validitas disajikan dalam tabel 3 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Item Pernyataan	r hitung	r tabel ($\alpha = 5\%$)	Keterangan
1	Akuntabilitas Publik	AP1	0,702	0,2241	Valid
		AP2	0,732	0,2241	Valid
		AP3	0,779	0,2241	Valid
		AP4	0,822	0,2241	Valid
		AP5	0,697	0,2241	Valid
		AP7	0,784	0,2241	Valid
		AP8	0,809	0,2241	Valid
		AP9	0,842	0,2241	Valid
		2	Transparansi Publik	TP1	0,364
TP2	0,450			0,2241	Valid
TP3	0,247			0,2241	Valid
TP4	0,690			0,2241	Valid
TP5	0,522			0,2241	Valid
TP6	0,611			0,2241	Valid
TP7	0,494			0,2241	Valid
TP8	0,504			0,2241	Valid
3	Kejelasan Sasaran Anggaran	KSA1	0,807	0,2241	Valid
		KSA2	0,832	0,2241	Valid
		KSA3	0,724	0,2241	Valid
		KSA4	0,854	0,2241	Valid
		KSA5	0,700	0,2241	Valid
		KSA6	0,812	0,2241	Valid
		KSA7	0,797	0,2241	Valid
4	Kinerja Aparat Pemerintah Daerah	KAP1	0,890	0,2241	Valid
		KAP2	0,596	0,2241	Valid
		KAP3	0,593	0,2241	Valid
		KAP4	0,851	0,2241	Valid
		KAP5	0,917	0,2241	Valid
		KAP6	0,777	0,2241	Valid
		KAP7	0,846	0,2241	Valid
		KAP8	0,877	0,2241	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Bahwa kesimpulan pada Tabel 3 keseluruhan item pernyataan dari variabel masing-masing dapat dikatakan valid, karena mempunyai r hitung $> r$ tabel (r hitung $> 0,2241$).

Uji Reliabilitas

Pada penelitian ini uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu jawaban kuesioner tersebut yang memiliki indikator dari variabel. Suatu jawaban kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban terhadap pernyataan adalah konstan atau stabil dari waktu

ke waktu. Teknik yang digunakan dalam uji reliabel ini menggunakan *Cronbach's Alpha (a)* dari masing-masing variabel. Pada penelitian ini menunjukkan hasil uji reliabilitas disajikan dalam Tabel 4 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha (a)</i>	Koefisien Alpha	Keterangan
Akuntabilitas Publik	0,917	0,60	Reliabel
Transparansi Publik	0,657	0,60	Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,897	0,60	Reliabel
Kinerja Aparat Pemerintah Daerah	0,916	0,60	Reliabel

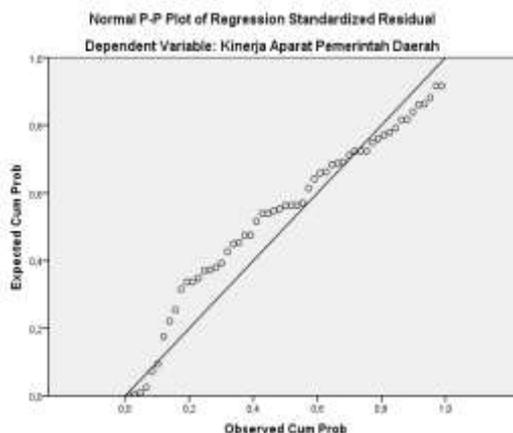
Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Kesimpulan pada Tabel 4 yaitu bahwa akuntabilitas publik sebesar 0,917, transparansi publik sebesar 0,657, kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,897, dan kinerja aparat pemerintah daerah sebesar 0,916. Dalam penelitian ini disimpulkan hasil dari data kuesioner menunjukkan bahwa pengukuran data dinyatakan sudah reliabel, karena nilai dari *Cronbach's Alpha* dalam masing-masing variabel lebih besar dari 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas data digunakan untuk menguji apakah model regresi antara variabel dependen dan variabel independen atau keduanya telah berdistribusi secara normal atau tidak. Jika distribusi data adalah normal, maka menggambarkan garis yang mengikuti garis diagonalnya. Untuk mendeteksi normalitas data, dengan melihat *Probability plot*. Uji normalitas data dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2
Uji Normalitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 2 *Normal P-P Plot Regression Standardized* diatas bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, maka dikatakan model regresi yang memenuhi asumsi normalitas. Dan untuk menguji normalitas residual dengan menggunakan uji statistic non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov (K-S)*. jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* dengan nilai signifikan >0,05 atau 5% maka distribusi datanya dikatakan normal. sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan <0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. Berikut hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,31174667
Most Extreme Differences	Absolute	,151
	Positive	,078
	Negative	-,151
Kolmogorov-Smirnov Z		1,118
Asymp. Sig. (2-tailed)		,164

a. Test distribution Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Tabel 5 terlihat bahwa hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar $0,164 > 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dinyatakan bahwa data tersebut telah terdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut.

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
AP	,504	1,982
TP	,949	1,053
KSA	,486	2,057

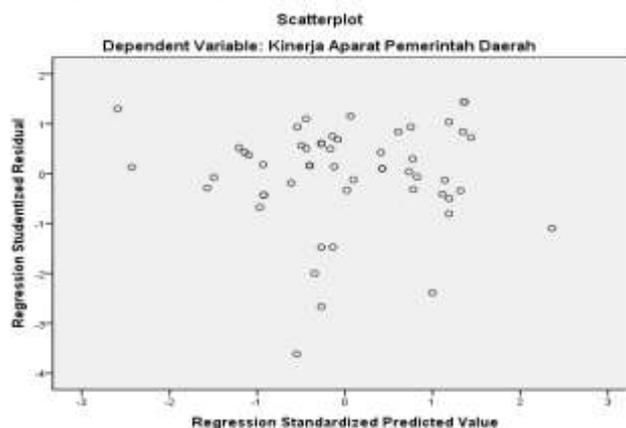
a. Dependent Variable: KAP

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 6 diatas maka diketahui nilai *tolerance* (TOL) menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai TOL $> 0,10$ dan hasil perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan semua variabel independen memiliki nilai VIF < 10 . Maka kesimpulan bahwa model dikatakan terbebas dari gejala multikolinieritas antar variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini, yaitu sebagai berikut:



Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 3 *scatterplot* diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, dan titik-titik data tidak membentuk pola yang jelas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi peneliti ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisi regresi linier berganda untuk mengetahui seberapa besar factor dalam model penelitian yaitu tentang akuntabilitas publik, transparansi publik, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Surabaya. Hasil dari jawaban kuesioner yang telah diisi, diolah menggunakan program komputer yaitu *Statistical Package for Social Science* (SPSS), dan menggunakan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 7 yaitu sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	T	Sig.		
				B	Std. Error
1	(Constant)	-15,107	5,556	-2,719	,009
	AP	,554	,149	2,431	,007
	TP	,672	,145	4,619	,000
	KSA	,704	,205	3,429	,001

a. Dependent Variable: KAP
Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 7 diatas maka hasil persamaan regresi berganda dapat ditentukan sebagai berikut:

$$KAP = -15,107 + 0,554AP + 0,672TP + 0,704KSA + e$$

Persamaan regresi dapat menunjukkan variabel akuntabilitas publik, transparansi publik, dan kejelasan sasaran anggaran yang memiliki koefisien pertanda positif. Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa: (1) Koefisien akuntabilitas publik sebesar 0,554 mengidentifikasi bahwa peningkatan semakin baik maka akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah dan sebaliknya jika akuntabilitas publik semakin buruk maka akan menurunkan kinerja aparat pemerintah daerah. (2) Koefisien transparansi publik sebesar 0,672 mengidentifikasi bahwa peningkatan semakin baik maka akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah dan sebaliknya jika transparansi publik semakin buruk maka akan menurunkan kinerja aparat pemerintah daerah. (3) Koefisien kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,704 mengidentifikasi bahwa peningkatan semakin baik maka akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah dan sebaliknya jika kejelasan sasaran anggaran semakin buruk maka akan menurunkan kinerja aparat pemerintah daerah.

Uji Kelayakan Model
Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) ini menunjukkan proporsi dari varian yang diterangkan oleh persamaan regresi terhadap varian total. Hasil uji Determinasi (R²) dapat dilihat pada Tabel 8 yaitu sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,761 ^a	,578	,554	3,408	1,685

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Tabel 8 bahwa besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *Adjust R Square* sebesar 0,554 atau 55,40%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel akuntabilitas publik, transparansi publik, dan kejelasan sasaran anggaran menjelaskan variabel kinerja aparat pemerintah daerah adalah sebesar 55,40% dan sisanya 44,60% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model.

Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan. Uji ini mempunyai kriteria pengujian yaitu sebagai berikut: (a) Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka model yang menunjukkan dalam penelitian tidak layak dan tidak dapat digunakan untuk analisis berikutnya. (b) Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka model yang menunjukkan dalam penelitian layak dan dapat digunakan untuk analisis berikutnya. Hasil perhitungan menggunakan *Statistical Package for Social Science* (SPSS) yang diperoleh nilai F terlihat pada ANOVA ditunjukkan pada Tabel 9 yaitu sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	812,728	3	270,909	23,328	,000 ^a
Residual	592,254	51	11,613		
Total	1404,982	54			

a. Predictors: (Constant), KSA, TP, AP

b. Dependent Variable: KAP

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Pada Tabel 9 dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung sebesar 23,328 dengan tingkat signifikan 0,000. Karena probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari $< 0,05$, maka menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel akuntabilitas publik, transparansi publik, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini menyimpulkan bahwa model yang menunjukkan dalam penelitian layak dan dapat digunakan untuk analisis berikutnya.

Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

Uji t ini mempunyai prosedur pengujian yaitu: (a) Jika nilai signifikan $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa yang didapat dari hasil uji t seperti yang ditunjukkan pada Tabel 10 yaitu sebagai berikut:

Tabel 10
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-15,107	5,556		-2,719	,009
AP	,554	,149	,397	2,431	,007
TP	,672	,145	,431	4,619	,000
KSA	,704	,205	,447	3,429	,001

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Dari perhitungan pengujian hipotesis pada Tabel 10 yaitu sebagai berikut: (1) Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,007 < 0,05$ dan hipotesis pertama (H_1) diterima. (2) Transparansi publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan hipotesis kedua (H_2) diterima. (3)

Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ dan hipotesis ke tiga (H_3) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Pada Tabel 10 bahwa akuntabilitas publik menunjukkan arah positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Dan menunjukkan tingkat signifikansi variabel akuntabilitas publik sebesar $0,007 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) peneliti ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mbon (2014) menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa akuntabilitas publik yaitu sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksana misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara *periodic*. Sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawab kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta peertanggungjawaban tersebut. Didalam pemerintahan akuntabilitas publik diterapkan dengan baik agar terwujudnya pemerintah yang bertanggungjawab dan transparan. Jadi dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat tidak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan. Hal ini pemerintah daerah melaksanakan dengan baik seluruh perencanaan yang ada karena dinilai dan diawasi oleh masyarakat. Dengan demikian pula, akuntabilitas publik menerapkan kinerja pemerintah daerah yang transparan dan terukur agar mengalami peningkatan tiap tahunnya, serta semua tingkatan pada SKPD akan meningkatkan kinerja manajerial. Jadi secara keseluruhan dengan adanya akuntabilitas publik pemerintah memberikan pertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja aparat pemerintah daerah dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal.

Pengaruh Transparansi publik terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Tabel 10 bahwa Transparansi publik menunjukkan arah positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Dan menunjukkan tingkat signifikansi variabel transparansi publik sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) peneliti ini menunjukkan bahwa transparansi publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2016), bahwa Transparansi publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Disimpulkan bahwa transparansi melalui SKPD mengungkapkan informasi kepada publik melalui media secara jelas, tepat, memadai, dan akurat serta masyarakat dapat mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini pemberian informasi kepada publik yang menjadikan kinerja pemerintah atau kegaitan yang dilakukan oleh pemerintah dapat diketahui dan dikontrol oleh publik karena mudah dalam mendapatkan informasi merupakan bentuk transparansi/keterbukaan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi dengan adanya tingkat transparansi publik semakin baik di pemerintahan daerah maka kinerja SKPD juga akan semakin baik dalam menjalankan tugasnya. Serta dengan adanya prinsip transparansi akan memberikan dampak terhadap tingkat kinerja SKPD dimasa yang akan datang.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Tabel 10 bahwa kejelasan sasaran anggaran menunjukkan arah positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Dan menunjukkan tingkat signifikansi variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar $0,001 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) peneliti ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013) bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Kenis (1979) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh karena itu, kejelasan sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan mengerti oleh mereka yang bertanggungjawab untuk menyusun dan melaksanakannya. Dengan demikian dapat disimpulkan kejelasan sasaran anggaran dibuat dan dimengerti secara jelas dan spesifik yang sesuai dengan rencana sebelumnya dan berdampak baik terhadap kinerja aparat itu sendiri. Sehingga dapat menentukan target dalam mencapai anggaran tersebut sehingga apa yang ditargetkan pada awalnya dapat terealisasi dengan baik. Hal ini mendorong karyawan melakukan yang terbaik untuk pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan kinerja. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan anggaran tidak termotivasi untuk pencapaian kinerja yang diharapkan. Maka kondisi ini harus ada sasaran anggaran yang jelas sehingga mempermudah pemerintah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi secara keseluruhan bahwa dengan adanya kejelasan sasaran anggaran maka akan berpengaruh besar terhadap tingkatnya kinerja atau aktivitas manajerial dari aparat itu sendiri. Serta mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan tugas organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Peneliti ini dilakukan untuk menguji akuntabilitas publik, transparansi publik, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Surabaya. Berdasarkan peneliti dan pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Hasil penelitian ini menyatakan akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan salah satu unsur pokok perwujudan *good corporate governance* dimana pemerintah melaporkan hasil dari program yang sudah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan efisien dan efektif. Dan menunjukkan bahwa semakin kuat dan tinggi akuntabilitas pemerintah maka akan semakin berpengaruh baik terhadap hasil kinerja aparat pemerintah daerah. (2) Hasil penelitian ini menyatakan Transparansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memberikan informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Dan menunjukkan bahwa semakin kuat dan tinggi Transparansi pemerintah maka akan semakin berpengaruh baik terhadap hasil kinerja aparat pemerintah daerah. (3) Hasil penelitian ini menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan tujuan anggaran yang sudah ditetapkan secara jelas dan spesifik agar anggaran itu mudah dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab. Dan menunjukkan bahwa

semakin kuat dan tinggi kejelasan sasaran anggaran pemerintah maka akan semakin berpengaruh baik terhadap hasil kinerja aparat pemerintah daerah.

Saran

Berdasarkan peneliti yang telah dilakukan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti memiliki beberapa saran yang disampaikan antara lain: (1) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya melakukan wawancara untuk meningkatkan pemahaman terhadap jawaban responden. (2) Untuk peneliti selanjutnya dapat memperbesar jumlah sampel. (3) Untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan memasukkan variabel-variabel lainnya sehingga dapat mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, A. 2009. Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderating. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara. 1(1): 1-34
- Kenis, I. 1979. *Effects of Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitude and Performance*, *The Accounting Review*. 54(24): 707-721.
- Krina, P, L. L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. 1st edition. Andi. Yogyakarta.
- , 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Andi. Yogyakarta.
- , 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Saran Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. 2(1):1-17.
- , 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Keempat. Andi. Yogyakarta.
- Mbon, F. E. 2014. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. *Jurnal Negeri Semarang*. 2(1): 1-10.
- Putra, D. 2013. Pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah kota padang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Salemba Empat. 1(1): 1-30
- Setiawan, W. 2012. Pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. *Skripsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Setiyawan, E. S dan M, Safri. 2016. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi publik, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jambi. 9(2): 1-20
- Soewadji, J. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Sopannah dan Wahyudi. 2010. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Widya Gama Malang dan Malang Corruption Watch (MCW). (2)2): 1-20
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Syafrial. 2009. Pengaruh Ketetapan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara. 3(4): 30-40
- www.surabaya.go.id. Diakses pada tanggal 28 November 2019 (13:30)